

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lima hari setelah berlangsungnya proklamasi, pada 22 Agustus 1945, pemerintah membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai wadah perjuangan. Seiring dengan ancaman yang kian meningkat, pada 5 Oktober 1945, BKR kemudian diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pasca Proklamasi kemerdekaan, Republik Indonesia fokus terhadap pengamanan wilayah negara, melalui TKR sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan.

Republik Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan, langsung dihadapkan dengan adanya permasalahan-permasalahan yang serius. Bukan saja bidang keamanan yang mendapatkan ancaman, dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan hubungan luar negeri turut mendapat ancaman yang nyata. Permasalahan tersebut, muncul dan berdatangan dari kalangan masyarakat elit atau tokoh-tokoh organisasi politik dan keagamaan serta ancaman dari pihak asing. Munculnya permasalahan kenegaraan tersebut akibat adanya ketidakpuasan terhadap keputusan pemerintah pusat. Ancaman yang muncul dari pihak luar negeri muncul ketika Belanda masih menganggap bahwa Indonesia merupakan wilayah jajahan yang sah di bawah komando Belanda. Ketika Belanda melakukan penyerangan melalui Agresi Militer Belanda I, mereka telah membatalkan Perjanjian Linggarjati mengenai status kemerdekaan Indonesia secara sepihak.

Situasi ini membuat Indonesia mengalami hal-hal yang sulit dalam bidang keamanan dan kesejahteraan. Indonesia yang masih terbelah negara baru mengalami ketidakstabilan dalam menjalankan sistem pemerintahannya.¹ Banyak kepala daerah dan tokoh-tokoh nasional yang resah dengan adanya Agresi Militer yang dilakukan oleh Belanda, karena dapat mengancam keselamatan masyarakat. Pada 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi gencatan senjata pada tanggal 5 Agustus. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sepakat melakukan gencatan senjata pada 17 Agustus hingga ditandatanganinya perjanjian Renville bersama Belanda.

Perjanjian damai dan gencatan senjata tersebut diselenggarakan di geladak kapal *USS Renville* milik Amerika Serikat. Delegasi Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin dan dari Belanda diwakili oleh Abdulkadir Widjojoatmodjo. Perjanjian ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN) atau *Committee of Good Offices for Indonesia*, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Isi perjanjian tersebut antara lain yaitu:²

1. Kedua belah pihak akan mengeluarkan perintah untuk menghentikan baku tembak dalam tempo 48 jam kepada pasukannya masing-masing yang berada di garis status quo (van Mook).

¹Ulf Sandhaussen, *Road To Power: Indonesian Military Politics 1945-1967*, (Oxford: Oxford University Press 1982), a.b Hasan Besari, *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 90

²A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 6: Perang Gerilya Semester I*, (Bandung: Dinas Sejarah dan Angkasa Bandung, 1978), hlm. 561-464.

2. Membentuk wilayah sementara sesuai dengan garis status quo.
3. Mengosongkan daerah dari penguasaan militer, tetapi tidak mengurangi hak dari kedua pihak menurut resolusi Dewan Keamanan tanggal 1, 25, 26 Agustus dan 1 Nopember 1947.
4. KTN akan menyerahkan pembantu militernya kepada kedua belah pihak yang akan menerima instruksi dan pertanggungjawaban untuk menentukan mengenai penyelidikan atas suatu insiden diperlukan.
5. Tanggung jawab ketertiban, keselamatan jiwa dan harta rakyat di daerah yang di kosongkan di pegang oleh polisi sipil dari kedua belah pihak.
6. Perdagangan dan perhubungan diperbolehkan.
7. Perjanjian ini berisi pokok-pokok yang disetujui kedua pihak, yaitu dilarang sabotase dan intimidasi, serta mencegah propaganda yang mengacaukan tentara dan rakyat, penyelidikan sepenuhnya diberikan pada pembantu militer dan sipil dari komisi.
8. Pembantu militer dari pihak komisi akan menyelidiki terutama di Jawa Barat, kegiatan kelompok republik di bagian pos depan Belanda yang masih melakukan perlawanan.
9. Segala kekuatan tenaga perjuangan dari kedua belah pihak dalam daerah yang dikosongkan di bawah pengawasan pembantu militer dari komisi akan dipindahkan ke daerah masing-masing.

10. Perjanjian ini berlaku jika tidak ada pihak yang memberitahukan kepada komisi jasa-jasa baik, dan pihak lain yang menganggap ada satu pihak yang melanggar aturan dan perjanjian ini harus dibatalkan.

Penandatanganan perjanjian *Renville* sebagai jalur diplomasi, turut memecah belah kekuatan Republik Indonesia. Hasil perjanjian tersebut merugikan Indonesia, serta wilayah Indonesia di pulau Jawa menjadi sempit. Wilayah Indonesia di pulau Jawa hanya meliputi sebagian wilayah Jawa Tengah dan Banten. Hal ini membawa akibat anggota tentara harus ditarik dari wilayah kependudukan Belanda dan harus pindah ke wilayah RI yang sempit. Kesepakatan mengenai wilayah tersebut berdasarkan *garis van Mook* atau garis dari *status quo* sebagai tanda dari gencatan senjata antara pihak Belanda dan Indonesia. Bagi masyarakat, ini merupakan sebuah kemunduran dalam dunia diplomasi Indonesia. Tentara Nasional Indonesia diberikan perintah untuk melakukan *hijrah*³ dengan segera ke daerah Ibukota pada saat itu, yakni Yogyakarta akibat konsekuensi perjanjian *Renville*.⁴ Permasalahan yang muncul bukan hanya dari hasil perjanjian *Renville* saja, banyak permasalahan muncul

³Hijrah memiliki arti berpindah atau merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh Jenderal Sudirman untuk menyebut penarikan pasukan Divisi Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian *Renville*, dengan harapan bahwa sewaktu-waktu pasukan Divisi Siliwangi akan kembali ke daerah asalnya, yaitu Jawa Barat. Holk H Dengel, *Kartosuwiryo Kampf um Einen Islamischen Darul Islam*, *Kartosuwiryo: Pe Staat Indonesien*, a.b Sinar Harapan *DI/TII dan Kartosuwirjo: Langkah Perwujudan Angan-angan yang Gagal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 63-64.

⁴Cornelis van Dijk, *Rebellion Under The Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia*, a.b Grafiti, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, (Jakarta: Grafiti, 1983), hlm. 63-65.

akibat kebijakan pemerintah mengenai reorganisasi pada tubuh TNI. Reorganisasi ini disebut juga sebagai Re-Ra (Reorganisasi dan Rekonsiliasi) pada masa Kabinet Amir Syarifuddin, yang bertujuan untuk merampingkan anggaran negara yang sedang membengkak.⁵ Munculnya program Re-Ra dinilai sebagai kesalahan pemerintah yang tidak segera membentuk struktur angkatan perang.⁶ Hal ini sangat merugikan para laskar-laskar gerilya liar yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Laskar-laskar gerilya tersebut sangat berharap untuk dapat bergabung menjadi anggota TNI secara resmi dan bukan tentara-tentara bentukan tokoh-tokoh masyarakat dan elit politik saja. Ketidakpuasan tersebut memunculkan gerakan-gerakan separatis yang memberontak terhadap pemerintah dan berusaha memecah kesatuan dan persatuan Indonesia.⁷

Kartosuwiryo sebagai tokoh elit politik Islam pada saat itu, tidak dapat menerima hasil keputusan dari perjanjian *Renville* tersebut. Ia menilai bahwa meninggalkan Jawa Barat tanpa adanya pasukan merupakan hal yang memalukan bagi pemerintah Indonesia dan merupakan sebuah kekalahan yang tak bisa ditolerir. Hal ini menjadikan landasan ia untuk mewujudkan cita-citanya, yakni mendirikan sebuah negara yang berpedoman terhadap hukum agama Islam, yaitu *Al-Qur'an* dan

⁵M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia*, a.b, Dharmono Hardjowidjono, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981), hlm. 342.

⁶Ulf Sandhaussen, *op.cit.*, hlm. 91.

⁷Euis Karlina, “Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di Kecamatan Salem Brebes: Persebaran dan Pemberontakannya (1948-1951)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu sosial, 2015), hlm. 2.

Hadist. Hal lain yang melandasi Kartosuwiryo mendirikan DI/TII adalah ketidaksukaan terhadap banyaknya golongan kiri yang berada di dalam tubuh pemerintahan Indonesia.⁸

Kartosuwiryo yang memiliki banyak kenalan dengan para tokoh-tokoh politik dan keagamaan di Garut serta tokoh Organisasi Islam di Indonesia, merupakan suatu modal penting baginya untuk mendapat dukungan dari masyarakat dan organisasi-organisasi Islam yang sependapat dengannya.⁹ Tokoh-tokoh organisasi Islam baik dari Masyumi ataupun tokoh masyarakat Islam lokal, banyak yang sependapat dan terhasut oleh ajakannya dalam mendirikan DI/TII dengan menjadikan Islam sebagai satu-satunya landasan negara.¹⁰ Laskar *Hizbullah* dan *Sabilillah* yang merupakan laskar pertahanan Islam TNI bentukan Masyumi menjadi tonggak unit militer negara yang diidamkan oleh Kartosuwiryo, yakni Tentara Islam Indonesia.¹¹

DI/TII akhirnya di proklamasikan di Cisayong, Tasikmalaya pada 7 Agustus 1949. Pedoman hukumnya terpusat pada *Qanun Azasi* dan perintah dari Imam

⁸Ulf Sandhaussen, *op.cit.*, hlm 92.

⁹Al-Chaidar, *Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosuwiryo (Mengungkap Manipulasi Sejarah Darul Islam/DI-TII semasa Orde Lama dan Orde Baru*, (Jakarta: Darul Falah, 1999), hlm. 30.

¹⁰Lukman Santoso, *Gerakan Separatis Islam*, (Yogyakarta: Palapa, 2014), hlm. 49.

¹¹Ruslan, dkk, *Mengapa Mereka Memberontak: Dedengkot Negara Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Bio Pustaka, 2008), hlm. 26.

tertinggi, yakni Kartosuwiryo.¹² Berkembangnya gerakan DI/TII di Jawa Barat terutama di Garut membuat pemerintah tidak tinggal diam dan segera mengambil sikap.¹³ Hal ini dikarenakan gerakan tersebut menyebabkan kekacauan dimana-mana setelah pasukan TNI dengan Divisi Siliwanginya melakukan *Long March* ke Jawa Barat, sebagai upaya pemulihan keamanan Indonesia.

Berdirinya DI/TII sendiri menjadi pusat perhatian pemerintah yang sedang mengalami pergolakan politik. Pemerintah menganggap bahwa gerakan DI/TII dapat memecah belah persatuan serta merupakan sebuah ancaman yang nyata terhadap kemerdekaan Indonesia. Pemerintah segera mengambil tindakan tegas dengan memerintahkan operasi militer yang tercantum pada peraturan pemerintah No. 59 tahun 1948.

Dekatnya hubungan kekerabatan antara DI/TII dengan masyarakat, membuat pemerintah harus mengambil jalan diplomasi terhadap gerakan DI/TII sebagai upaya agar tidak menyebabkan jatuhnya korban jiwa di kalangan masyarakat. Usaha diplomasi yang dilakukan pemerintah terhadap gerakan DI/TII tidak memunculkan hasil yang positif. Hal ini dikarenakan Kartosuwiryo menuntut diadakannya perundingan dengan utusan wakil tertinggi pemerintah dan bukan seorang utusan negara. Perundingan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meredam gerakan DI/TII tidak hanya sekali dilakukan, namun berkali-kali. Setiap usaha pemerintah dalam

¹²“Ringkasan Kronologis Harokah Islam Fil Indonesia”, *Al-Wustho*, t.t., hlm. 16.

¹³Lukman Santoso, *op.cit.*, hlm 51.

mengajak berunding terhadap DI/TII tidak pernah menemukan titik temu dalam kesepakatan.

Tidak adanya titik temu tersebut, pemerintah menganggap gerakan DI/TII meresahkan masyarakat dan kedaulatan negara. Pemerintah segera mengambil tindakan dengan memerintahkan adanya operasi penumpasan, sebagai respon maraknya kegiatan DI/TII yang lama-kelamaan meresahkan warga dan keutuhan kedaulatan negara. Operasi penumpasan tersebut diberi nama sebagai Operasi Merdeka.

Pelaksanaan operasi penumpasan DI/TII di Garut, membuat TNI memberikan perintah terhadap Divisi Siliwangi untuk segera menumpas gerakan tersebut. Batalyon 306 yang dipimpin oleh Dan-Yon Alwin Nurdin diterjunkan dalam menumpas pergerakan DI/TII di Garut.¹⁴ Operasi penumpasan yang dilakukan oleh Batalyon 306 Divisi Siliwangi, pada mulanya tidak begitu membuahkan hasil yang positif dalam mengembalikan keamanan negara seperti semula. Berbeda dengan kegiatan DI/TII yang berbanding terbalik serta didukung oleh medan tempur dan kondisi wilayah berupa pegunungan.¹⁵

Sikap TNI yang tidak mengikut sertakan masyarakat dalam menumpas DI/TII menjadi salah satu hambatan berjalannya operasi penumpasan. Hal ini bisa terjadi karena sikap TNI tersebut membuat masyarakat menjadi antipati terhadap segala

¹⁴Alwin Nurdin, *Riset Tentang Batalyon Dalam Operasi Anti-Gerilya Divisi Siliwangi/Teritorium-III Jawa Barat*, (Bandung: Disjarah TNI AD, 1999), hlm. 1.

¹⁵Al-Chaidar, *op.cit.*, hlm 27.

kegiatan TNI.¹⁶ Usaha-usaha TNI yang tidak membuahkan hasil dalam pelaksanaan operasi penumpasan DI/TII di Garut, membuat Kodam VI Siliwangi untuk mengumpulkan tentara-tentara yang ahli dalam bidang strategi perang. Hal ini karena Batalyon 306 masih menggunakan taktik pasif-defensif. Hasil dari berkumpulnya ahli-ahli strategi TNI ialah munculnya siasat Pagar Betis¹⁷ sebagai usaha menumpas gerakan yang meresahkan keamanan negara selama 12 tahun di Garut. Pemerintah menyiapkan operasi gabungan dari berbagai divisi dan bagian kewanatan negara seperti satuan Mobrig sebagai lanjutan dari operasi Pagar Betis.

Operasi penumpasan ini diberi nama Operasi Bratayudha. Pelaksanaan operasi ini dipimpin oleh Kolonel Ibrahim Adjie selaku Pangdam VI Siliwangi serta melibatkan Kodam VII Dipenogoro, dan Kodam VIII Brawijaya dan satuan-satuan keamanan lainnya.¹⁸ Operasi Bratayudha ini dilakukan atas dasar berhasilnya strategi yang dirancang dalam Rencana Operasi 2. 1. (R.O. 2. 1.). Dari hasil ini, pemerintah dan TNI ingin meningkatkan operasi tersebut dalam Rencana Operasi 2. 1. 2. 1 (R.O. 2. 1. 2. 1) sebagai usaha pemulihan kewanatan negara.¹⁹ Hal ini sejalan dengan Tri

¹⁶Alwin Nurdin, *op.cit.*, hlm.2.

¹⁷Pagar Betis merupakan strategi tentara yang ,melibatkan masyarakat dalam menumpas gerakan DI/TII. Pagar Betis juga merupakan singkatan dari Pasukan Garnisun Berantas Tentara Islam.

¹⁸Kholid. O. Santosa, *Jejak-jejak Sang Pejuang Pemberontak: Pemikiran, Gerakan, dan Ekspresi Politik S.M. Kartosuwiryo dan Daud Beureuh*, (Bandung: Segi Arsy, 2006), hlm. 116.

¹⁹Disjarah TNI AD, *Penumpasan DI/TII S.M. Kartosuwiryo di Jawa Barat*, (Bandung: Disjarah TNI AD, 1985), hlm. 128.

Program Pemerintah kala itu, yang salah satu isinya menyatakan bahwa masalah keamanan di seluruh Indonesia tanpa terkecuali harus diselesaikan pada akhir tahun 1962.²⁰

Operasi ini membuahkan hasil yang signifikan, setelah tertangkapnya Kartosuwiryo bersama anaknya Muhammad Darda dan salah satu komandan DI/TII yakni Aceng kurnia di Gunung Geber, Majalaya. Penangkapan ini dipimpin oleh Mayor Sanip selaku Dan-Yon 328 dan Letda Suhandha beserta pasukannya, yang telah mengepung tempat Kartosuwiryo berada. Tertangkapnya pimpinan tertinggi DI/TII membuat pasukan-pasukan yang masih bergerilya menyerah.²¹

Sebelum dilancarkan operasi gabungan Bratayudha, banyak sekali hambatan yang terjadi dalam tubuh pemerintah. Wilayah geografis Garut yang dikelilingi pegunungan dan hutan begitu mendukung taktik gerilya yang dilakukan oleh DI/TII. TNI yang melakukan operasi penumpasan tahap pertama melalui Operasi Merdeka, tidak membuahkan hasil dalam melakukan operasi penumpasan gerakan DI/TII. Tidak efisiennya pasukan TNI ternyata memberikan ruang bagi DI/TII untuk memegang inisiatif penyerangan dengan mobilitas tinggi serta perang gerilya.²²

Adanya gerakan DI/TII dan operasi penumpasannya memberikan dampak positif dan negatif yang cukup terasa bagi masyarakat. Masyarakat banyak

²⁰Aan Ratmanto, *Pasukan Siliwangi: Loyalitas, Patriotisme dan Heroisme*, (Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2012), hlm. 185.

²¹Disjarah TNI, *op.cit.*, hlm. 129.

²²*Ibid*, hlm. 130.

menyebabkan konflik dari DI/TII dan TNI memberikan dampak banyak korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak dan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka diperoleh rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Mengapa gerakan DI/TII diterima di kalangan masyarakat?
2. Bagaimana perkembangan DI/TII di Garut?
3. Bagaimana pelaksanaan operasi penumpasan pemberontakan DI/TII di Garut 1950-1962?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum
 - a. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir logis, kritis, sistematis, analitis serta objektif sesuai dengan metode sejarah sehingga bisa memahami suatu nilai yang ada dalam sebuah peristiwa sejarah.
 - b. Menerapkan metode sejarah dalam penelitian sejarah.
 - c. Menambah dan mengembangkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang sejarah.
2. Tujuan Khusus
 - a. Mengetahui perkembangan masyarakat Garut.
 - b. Mengetahui perkembangan dari DI/TII di Garut.
 - c. Mengetahui pelaksanaan operasi militer dalam penumpasan DI/TII di Garut

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

- a. Melatih kemampuan peneliti untuk menganalisis dan merekonstruksi sebuah peristiwa sejarah lokal dalam bentuk karya ilmiah.
- b. Mengembangkan wawasan sejarah yang kritis tentang operasi militer dalam menyelesaikan konflik DI/TII.
- c. Memperluas pengetahuan penulis tentang peristiwa sejarah yang terjadi di Garut.

2. Bagi Pembaca

- a. Memberikan informasi kepada pembaca tentang kondisi umum masyarakat Garut sebelum berkembangnya DI/TII.
- b. Memberikan informasi tentang proses berdiri dan perkembangan DI/TII di Garut beserta berbagai kegiatan DI/TII di Tasikmalaya.
- c. Memberikan informasi mengenai peranan batalyon 306 dalam melaksanakan operasi penumpasan pemberontakan DI/TII di Garut.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian yang menelaah terhadap pustaka atau literatur yang menjadi landasan pemikiran dalam sebuah penelitian sejarah.²³ Kaitannya dengan penelitian sejarah, kajian pustaka menjadi penting mengingat dalam proses merekonstruksi suatu peristiwa sejarah seorang peneliti memerlukan

²³Tim Prodi *Ilmu Sejarah, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), hlm. 6.

rujukan agar karya yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Kajian pustaka juga dapat menambah informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam proses penulisan.²⁴

Buku pertama ialah *Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo* yang ditulis oleh Pinardi dan diterbitkan oleh Aryaguna, menjelaskan bagaimana Kartosuwiryo dalam menanggapi perjanjian *Renville* serta pengaruhnya terhadap masyarakat dan pengikutnya. Kartosuwiryo yang menikahi putri *Ajengan* di daerah Garut, yakni Dewi Siti Kalsum, membuatnya semakin dikenal oleh masyarakat Garut sebagai orang yang terpandang.

Saat pemerintah mengadakan perundingan dengan pihak Belanda di atas geladak kapal perang Amerika yakni *USS Renville*, hasilnya tidak menguntungkan pemerintah Indonesia. Indonesia harus menarik pasukan dari daerah kependudukan Belanda, dan mengosongkan wilayah Jawa Barat serta melakukan *hijrah* ke Yogyakarta.²⁵ Kartosuwiryo yang melihat Jawa Barat mengalami kekosongan pemerintahan, memproklamasikan kemerdekaan wilayah tersebut sebagai *Darul Islam* (Negara Islam Indonesia). Laskar *Hizbullah* dan *Sabilillah* yang menolak untuk mengikuti Divisi Siliwangi hijrah ke Yogyakarta, menjadi satuan militer NII dengan nama Tentara Islam Indonesia (TII). Hal inilah yang melandasi gerakan DI/TII menjadi wadah aspirasi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia yang

²⁴Suhartono, W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 156.

²⁵Pinardi, *Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo*, (Jakarta: Aryaguna, 1964), hlm. 32.

meninggalkan rakyatnya. Adanya rasa hormat terhadap DI/TII yang menjaga keamanan warga dari pihak Belanda, masyarakat juga menyimpan rasa ketakutan terhadap DI/TII. Hal ini karena sewaktu-waktu masyarakat bisa diserang dan dibunuh bila dicurigai membantu pasukan TNI. Gerakan DI/TII di Garut berkembang dengan pesat karena adanya kesamaan dalam pemahaman agama. Bagi masyarakat Garut, DI/TII merupakan suatu hal yang kongkrit mengenai pedoman hidup.

Buku kedua yaitu *Rebellion Under The Banner of Islam (The DI/TII in Indonesia)* yang ditulis oleh van Dijk diterjemahkan oleh Grafiti Pers menjadi *DI/TII Sebuah Pemberontakan*. Buku ini membantu penulis dalam memahami perkembangan DI/TII di Garut, karena secara garis besar menceritakan sepak terjang dan Perkembangan DI/TII di Jawa Barat. Sepak terjang dan perkembangan DI/TII di Garut dibahas dalam satu bab dengan judul Bab *Jawa Barat, Buaian*. Pada bab ini menceritakan mengenai perkembangan DI/TII di wilayah Jawa Barat beserta kegiatannya respon masyarakat.

DI/TII dalam melaksanakan aktivitasnya banyak melakukan pemberontakan di daerah-daerah Jawa Barat termasuk wilayah Garut. Pemberontakan yang terjadi tidak dilakukan oleh sembarang orang. Banyak dari anggotanya merupakan tokoh-tokoh terkemuka dan berjasa bagi Republik Indonesia. Gerakan DI/TII mempunyai basis pasukan bernama Tentara Islam Indonesia (TII) yang berasal dari laskar *Hizbullah* dan *Sabilillah*. Laskar gerilya ini merupakan baris pertahanan rakyat Islam yang didirikan oleh Masyumi pada masa kedudukan Jepang. Anggota laskar *Hizbullah* dan *Sabilillah* terdapat yang berasal dari kalangan santri Institut *Suffah* yang didirikan

oleh Kartosuwiryo di Malangbong, Garut.²⁶ Sistem pendidikan di Institut *Suffah* ini pada mulanya menganut ke sistem madrasah dan pesantren. Pada saat kedatangan Jepang, institut ini tidak hanya mempelajari pendidikan umum, melainkan pelatihan kemiliteran turut diajarkan dan dimasukkan dalam kurikulum pengajarannya.

Pada saat Institut *Suffah* dihancurkan oleh pasukan Belanda, sistem pengajaran yang diberikan oleh Institut *Suffah* ini dilakukan secara berpindah-pindah tempat dan difokuskan di daerah-daerah yang dekat dengan aktifitas keagamaan. Hal ini membuat masyarakat tertarik untuk mendukung gerakan DI/TII yang lebih melindungi masyarakat untuk melawan Belanda. Laskar *Hizbullah* dan *Sabilillah* yang menjadi kekuatan tentara DI/TII sendiri terbentuk dalam satuan tingkat divisi, resimen, batalyon hingga pada satuan tingkat regu. Sebelum menjadi satuan ketentaraan DI/TII, Divisi Siliwangi menawarkan laskar *Hizbullah* dan *Sabilillah* untuk bergabung dan mengikuti perintah untuk meninggalkan Jawa Barat. Namun, mereka menolak dan beralasan menjaga keamanan wilayah Jawa Barat serta penduduk dari pihak Belanda. Selain menolak ajakan tersebut, perintah untuk memberikan senjata terhadap pasukan TNI turut ditolak oleh para anggota laskar *Hizbullah* dan *Sabilillah*. Setiap taktik dan aktivitas pasukan DI/TII tidak pernah bergerak dalam satuan yang besar. Kegiatan mereka paling besar hanya sampai pada tingkat batalyon yang berjumlah sekitar 300 orang dan berpencar dalam hutan. Hal ini sejalan dengan siasat gerilya yang diterapkan oleh mereka, yang menuntut bergerak dalam kelompok kecil serta terus bergerak aktif dalam melakukan perang gerilya.

²⁶Cornelis van Dijk, *op.cit.*, hlm. 32

Buku ketiga yang membantu penulis dalam memahami perkembangan DI/TII di Garut ialah *Jejak Jihad S.M. Kartosuwiryo: Mengungkap Fakta yang Didustakan* yang ditulis oleh Irfan S. Awwas dan diterbitkan oleh Uswah. DI/TII dalam memperluas kekerabatan dengan masyarakat, kegiatan mereka berdakwah dan mengisi kegiatan keagamaan Islam yang merupakan aktifitas mayoritas masyarakat di Garut. Masyarakat Garut yang mayoritasnya menganut agama Islam sangat kental dengan aktifitas-aktifitas keagamaan. Selain itu, para anggota DI/TII juga turut mengajarkan beladiri terhadap para pemuda-pemuda serta mengajak untuk bergabung dalam kesatuan DI/TII dengan alasan *jihad*. Hal ini sesuai dengan sistem pengajaran Institut *Suffah* yang mengajarkan pendidikan dan pemahaman agama secara berpindah-pindah setelah Institut *Suffah* di hancurkan oleh pihak Belanda.

Pergerakan DI/TII yang dapat mengambil hati masyarakat, membuat mereka semakin berkembang dengan pesat. Anggota DI/TII banyak bertambah seiring gencarnya mereka melakukan aktifitas dakwah, pendidikan dan mengajarkan beladiri kepada masyarakat terutama kepada para pemuda-pemuda desa. Bertambahnya anggota DI/TII membuat mereka mencari tambahan senjata untuk mengamankan wilayah kekuasaan mereka, terutama di Garut. Dalam buku pinardi dijelaskan bahwa Kartosuwiryo memiliki hubungan dengan pihak-pihak asing untuk keperluan pasukan DI/TII yang membutuhkan logistik seperti amunisi persenjataan tambahan. Sistem hukum atau pedoman anggota DI/TII sudah ditetapkan terlebih dahulu sebelum

diproklamasikannya kemerdekaan NII. Hukum-hukum tersebut berlandaskan hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist.²⁷

Buku keempat yang menjadi acuan ialah *Penumpasan Pemberontakan DI/TII S.M. Kartosuwiryo di Jawa Barat* yang disusun dan diterbitkan oleh Disjarahad di Bandung. Buku ini membantu penulis dalam memahami respon pemerintah terhadap pergerakan DI/TII di Garut. DI/TII yang berkembang pesat di Garut, banyak melancarkan aksi-aksi penyerangan seperti penjarahan dan penculikan. Wilayah Garut merupakan daerah operasi penumpasan yang masuk kategori DO-C (Daerah Operasi C) atau wilayah target utama dalam penumpasan DI/TII.²⁸ Wilayah-wilayah pusat komando kegiatan DI/TII ini berada di priangan timur dan disebut sebagai “Segitiga Malangbong” yang melingkupi daerah Majalengka, Malangbong (Garut) dan Tasikmalaya. Daerah yang disebut sebagai segitiga ini merupakan pusat perhatian pihak pemerintah dan TNI dalam melaksanakan operasi militer. Dalam pelaksanaan operasi penumpasan, pada masa awal-awal DI/TII berdiri hingga pada tahun 1958, tidak ada operasi yang berhasil diraih. Setiap pelaksanaan operasi selalu mengalami kekalahan dalam medan tempur yang lokasinya berada di lereng-lereng pegunungan. Kondisi geografis di Garut memiliki banyak daerah pegunungan lebih menguntungkan pihak DI/TII dalam bertemour daripada TNI yang hanya melakukan operasi secara konvensional, insidental dan pasif-defensif. Perbedaan buku ini dengan

²⁷Irfan S. Awwas, *Jejak Jihad S.M. Kartosuwiryo: Mengungkap Fakta yang Didustakan*, (Yogyakarta: Uswah, 2007), hlm. 145.

²⁸Disjarah TNI AD, *op.cit.*, hlm. 130.

skripsi adalah pembahasan mengenai Garut dalam buku ini tidak banyak dibahas secara rinci dalam setiap peristiwanya.

Buku kelima yang membantu penulis yaitu *Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI-Angkatan Darat* yang diterbitkan oleh Disjarahad dan Fa. Mahjuma. Buku ini membantu penulis dalam memahami pelaksanaan operasi penumpasan yang dilakukan oleh TNI. Pada tahun 1959-1962, terdapat strategi-strategi militer yang digunakan oleh TNI berdampak positif dalam pelaksanaan operasi penumpasan Gerakan DI/TII di Garut. Hal ini menjadi titik balik keberhasilan TNI dalam melaksanakan operasi penumpasan DI/TII di Garut dan seluruh Jawa Barat. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran masyarakat yang turut aktif membantu TNI melaksanakan operasi Pagar Betis dalam membuat pos-pos pertahanan disekitar lereng gunung. Operasi Bratayudha merupakan operasi gabungan sebagai respon keberhasilan strategi-strategi militer yang telah digunakan dan berdampak positif terhadap keamanan masyarakat dan Republik Indonesia.²⁹

F. Historiografi yang Relevan

Historiografi merupakan suatu kisah masa lampau yang direkonstruksi oleh sejarawan berdasarkan fakta yang ada.³⁰ Menurut Gottschalk, historiografi adalah rekonstruksi imajinatif tentang masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan

²⁹*Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI Angkatan Darat*. (Bandung: Disjarah dan Fa Mahjuma, 1972), hlm. 220

³⁰Tim Prodi Ilmu Sejarah, *op.cit.*, hlm. 6.

masa lampau.³¹ Tujuan dari historiografi yang relevan adalah untuk mendapatkan sebuah karya sejarah lebih jelas. Disamping itu penggunaan historiografi yang relevan ialah upaya perbandingan sebuah penelitian yang akan dilangsungkan dengan penelitian sejarah yang telah ada. Adapun tujuan dari adanya historiografi yang relevan adalah untuk mendapatkan sebuah karya sejarah yang benar-benar baru dengan harapan tidak terjadi pengulangan pembahasan.

Penulis menggunakan beberapa historiografi yang relevan dalam penelitian. Pertama, menggunakan skripsi karya Lia Rohmawati mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul “Peran Divisi Siliwangi dalam Penumpasan Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat (1948-1962)”. Lia menjelaskan bagaimana peran Divisi Siliwangi yang mendapatkan tugas resmi dari Pemerintah untuk menumpas pemberontakan DI/TII di Jawa Barat. Untuk menghentikan pasukan DI/TII pemerintah mengirim Operasi Militer pada 27 Desember 1949 melalui Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1948.

Kedua, penulis menggunakan skripsi karya Reno Aprilia Dwijayanto, mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul “Sistem Militer Dalam Tentara Islam Indonesia (TII) di Jawa Barat Pada Masa Kartosuwiryo (1948-1962)”. Dalam skripsi ini Reno menjelaskan tentang sistem militer DI/TII yang rapih sehingga bisa bertahan lama melawan Tentara Republik. Inti dari kekuatan TII terdiri dari pasukan *Hizbullah* dan *Sabilillah* yang tidak mau

³¹Louis Gottschalk, *Understanding History: A Primer of Historical Method*, a.b, Nugoroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 32.

masuk menjadi anggota TNI dan menolak hijrah akibat konsekuensi perjanjian Renville. Selain itu untuk menambah kekuatan tempur TII, pihak DI/TII merekrut pemuda-pemuda desa untuk dilatih dan dijadikan sebagai anggota TII.

Ketiga, Skripsi yang digunakan dalam historiografi yang relevan adalah skripsi dari Euis Karlina seorang mahasiswa jurusan Ilmu Sejarah di Universitas Negeri Yogyakarta. Skripsi Euis ini berjudul “Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di Kecamatan Salem Brebes: Persebaran dan Pemberontakannya (1948-1951)”. Skripsi ini membahas perkembangan DI/TII dan proses penyebarannya di masyarakat dan pemberontakannya terhadap pemerintahan negara Indonesia.

Perbedaan penulis dengan ketiga skripsi bisa dilihat dari daerah yang diambil lebih spesifik yaitu daerah Garut, serta tahun yang diambil dimulai dari 1950-1962. Perbedaan yang menonjol dengan skripsi Lia adalah dalam pembahasan tidak membahas peristiwa yang terjadi di Garut secara keseluruhan. Mengenai objek kajian, penulis mempunyai kesamaan dengan Reno, Lia dan Euis yang menjadikan militer sebagai objek kajian.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis. Metode penelitian historis merupakan suatu proses untuk menguji dan mengkaji kebenaran rekaman sejarah dan peninggalan-peninggalan masa lampau dengan menganalisa secara kritis terhadap data yang ada sehingga menjadi penyajian

dan cerita yang dapat dipercaya.³² Penelitian ini menggunakan empat tahapan penelitian, sebagai berikut.

a. Heuristik

Heuristik merupakan kegiatan mencari sumber atau mengumpulkan jejak-jejak masa lampau yang disebut sumber sejarah. Peristiwa sejarah tidak dapat direkonstruksi sebagai sebuah kisah tanpa sumber sejarah. Sumber yang dikumpulkan merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk merekonstruksi sejarah menjadi karya ilmiah. Pengumpulan sumber dilakukan di Dinas Sejarah Angkatan Darat (Disjarahad), Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Bapusipda) Propinsi Jawa Barat, Bapusipda Kabupaten Garut, Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNY, Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Laboratorium Sejarah FIS UNY dan beberapa koleksi pribadi.

Menurut Helius Syamsudin, sumber sejarah adalah sesuatu yang langsung atau tidak langsung menceritakan suatu kenyataan atau kegiatan manusia di dalam penelitian sejarah, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.³³ Dari pendapat Helius Syamsudin sumber sejarah dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

³²Helius Syamsudin dan Ismaun, *Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Depdikbud, 1996), hlm. 61.

³³Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 31.

1) Sumber Primer

Sumber primer merupakan kesaksian dari seroang pelaku atau saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan alat indera lain, atau dengan alat mekanis.³⁴ Pada umumnya sumber primer adalah bukti kontemporer atau sejaman dengan peristiwa yang terjadi. Sumber Primer dapat berupa arsip pemerintah maupun pribadi, wawancara langsung dengan pelaku atau saksi dan catatan rapat. Sumber primer yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

a. Arsip

Dokumen Sejarah DI/TII, SP.0023/D/03/01, No.63. 1954

Dokumen Sejarah DI/TII, SP.0049/D/03/01, No.54. 1957.

Dokumen Sejarah DI/TII, Disjarah TNI AD, Album Pemberontakan DI/TII di Indonesia.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian digunakan untuk mengumpulkan data keterangan yang berkaitan dalam kehidupan masyarakat. Wawancara dalam penelitian sejarah bertujuan untuk mengumpulkan keterangan yang berkaitan dengan masalah penelitian.³⁵ Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa DI/TII di Garut.

³⁴Helius Syamsudin dan Ismaun, *op.cit.*, hlm. 35.

³⁵Tim Prodi Ilmu Sejarah, *op.cit.*, hlm. 7.

Daftar Narasumber:

1. Sardjono Kartosuwiryo
2. Sarfiman
3. Sri Hardanti Herawati
4. Ahmad Syuhada

2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya.³⁶ Sumber sekunder merupakan sumber kedua setelah primer yang dikutip dari orang pertama yang dijabarkan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, jurnal, dan tulisan-tulisan lainnya. Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut.

Ade Firmansyah, *SM. Kartosuwiryo: Biografi Singkat 1907-1962*, Yogyakarta: Garasi, 2011.

Aan Ratmanto, *Pasukan Siliwangi: Loyalitas, Patriotisme dan Heroisme*, Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2012.

Dinas Sejarah TNI AD, *Penumpasan Pemberontakan DI/TII S.M. Kartosuwiryo di Jawa Barat*, Bandung: Dinas Sejarah TNI AD, 1985.

Holk H. Dengel, *Kartosuwiryo Kampf um Einen Islamischen Darul Islam, Kartosuwiryo: Pe Staat Indonesien*, a.b Sinar Harapan DI/TII-NII dan Kartosuwiryo “Angan-Angan yang Gagal”, Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2011.

Irfan S. Awwas, *Jejak Jihad SM. Kartosuwiryo*, Yogyakarta: Uswah, 2008.

³⁶Louis Gottschalk, *op.cit.*, hlm. 43.

Irfan S. Awwas, *Trilogi Kepemimpinan Negara Islam Indonesia: Mengungkap Perjuangan Umat Islam dan Pengkhianatan Kaum Nasionalis-Sekuler*, Yogyakarta: Uswah, 2009.

Pinardi, Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo: *Kisah Lahir dan Djatuhnya Seorang Petualang Politik*, Jakarta: Aryaguna, 1964.

van Dijk, *Rebellion Under The Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia* a.b, Grafiti Pers, *DI/TII: Sebuah Pemberontakan*, Jakarta: Garfiti Pers, 1983.

b. Kritik Sumber (Verifikasi)

Tahap kedua setelah heuristik adalah kritik sumber atau verifikasi. Verifikasi merupakan suatu proses pengujian dan menganalisa secara kritis mengenai keotentikan sumber yang dikumpulkan. Verifikasi bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu kritik ekstern dan kritik intern.³⁷ Kritik ekstern mengkaji sumber sejarah dari luar mengenai keaslian kertas yang digunakan, ejaan tulisan, gaya tulisan, jenis tinta, dan semua penampilan luar untuk mengetahui autentitasnya. Kritik intern memberikan penilaian terhadap sumber sejarah dari isi dokumen. Kritik intern ini digunakan untuk mendapatkan kredibilitas dokumen, sehingga dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan.

Tujuan verifikasi adalah peneliti tidak begitu saja menerima yang tercantum dan tertulis pada sumber yang diperoleh. Sumber-sumber yang telah terkumpul harus disaring dengan seksama sehingga diperoleh fakta yang sesungguhnya. Verifikasi diperlukan peneliti untuk menentukan autentisitas

³⁷Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2005), hlm. 100.

dan kredibilitas tentang Operasi Militer Dalam Penumpasan DI/TII di Garut pada 1959-1962 dinilai dari kritik eksten dan kritik intern. Keterkaitan antara kritik ekstern dan kritik intern dijadikan fakta sejarah yang digunakan peneliti dalam penulisan sejarah.

c. Interpretasi

Interpretasi adalah menafsirkan atau memberikan makna pada fakta atau bukti sejarah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan proses penelitian sejarah.³⁸ Didalam proses interpretasi atau penafsiran itu juga menyangkut proses seleksi sejarah. Hal ini disebabkan karena tidak semua fakta dapat dan harus kita masukkan dalam kisah sejarah yang kita kaji. Kita harus memilih mana yang relevan dan bermakna dalam suatu kisah sejarah yang akan kita susun. Kegiatan interpretasi dan penafsiran itu, termasuk menentukan periodisasi, sehingga kisah sejarah nanti menjadi jelas.³⁹

Pada tahap ini peneliti dituntut untuk cermat dan teliti dalam mengungkapkan dan menghubungkan satu fakta dengan fakta yang lain karena proses interpretasi sering dikaitkan dengan subyektivitas. Seorang

³⁸A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 81.

³⁹Sardiman, *Mengenal Sejarah*, (Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2004), hlm. 101.

sejarawan harus mampu menafsirkan data yang dimilikinya agar peristiwa sejarah dapat dipahami oleh pembaca.⁴⁰

c. Historiografi

Historiografi merupakan proses memadukan berbagai pernyataan dan fakta-fakta tentang masa lampau yang selanjutnya ditulis dalam bentuk tulisan sejarah.⁴¹ Aspek kronologi berperan penting karena penelitian sejarah tidak hanya meringkas hasil penelitian dan menulis kesimpulan tanpa memperhatikan gaya penulisan dan strategi peneliti. Historiografi menampilkan kemampuan menulis peneliti secara efektif melalui proses interpretasi. Historiografi menuntut peneliti untuk mengerahkan seluruh daya dan pikirannya untuk menghasilkan karya ilmiah yang berkesinambungan.

H. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan yang pertama menggunakan pendekatan sosiologi. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peristiwa sosial, seperti golongan yang memiliki peran serta hubungan-hubungan dengan golongan lain, konflik berdasarkan kepentingan, ideologi dan sebagainya⁴². Selain itu, sosiologi digunakan untuk mengetahui kondisi

⁴⁰Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm, 101-103.

⁴¹Abd. Rahman Hamid dan Mahmud Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 51.

⁴²Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1992), hlm. 4.

budaya yang terdapat dalam lapisan sosial masyarakat. Menurut Herbert Spencer, manusia seperti suatu organisme. Organisme dalam hal ini yaitu pengertian sebagai himpunan atau suatu kesatuan dari unsur-unsur yang saling berhubungan selama jangka waktu yang berdasar pada pola tertentu.⁴³ Pendekatan ilmu sosiologi dalam kajian sejarah memiliki tujuan dalam memberikan kerangka konseptual seperti struktur sosial, interaksi sosial, dan pola tindakan. Selain meneliti terkait Operasi Militer Bratayudha di Garut, penelitian ini melibatkan faktor-faktor di sekitarnya seperti dampak terhadap masyarakat ketika pelaksanaan operasi militer tersebut.

2. Pendekatan Agama

Pendekatan agama merupakan suatu pengkajian terhadap agama sebagai realitas sosial baik berupa teks, perilaku sosial yang lahir sebagai perwujudan yang berisi tentang peran agama.⁴⁴ Pendekatan agama digunakan karena DI/TII adalah sebuah gerakan yang berlandaskan agama Islam. Anggota dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam gerakan DI/TII adalah masyarakat yang berkeyakinan pada agama Islam. Setiap pergerakan DI/TII di Garut tidak lepas dari peran masyarakat sekitar yang beranggapan bahwa menolong DI/TII merupakan suatu keharusan karena merupakan perintah agama.

⁴³Soerjono Soekanto, *Teori Sosial Tentang Pribadi dalam Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 6.

⁴⁴Imam Supragyo, *Metodologi Penelitian Agama*, (Bandung: Remanaja Rosdajarya, 2001), hlm. 17-18.

3. Pendekatan Militer

Pendekatan ini melihat suatu peristiwa serta memahami adanya konflik dan kekerasan dari suatu kelompok yang diorganisir dengan disiplin militer dengan tujuan utamanya adalah bertempur dan memenangkan peperangan sebagai upaya mempertahankan negara.⁴⁵ TNI mempunyai tugas untuk mengamankan kedaulatan negara dan melindungi masyarakat dari ancaman. Pendekatan militer digunakan oleh peneliti dalam penulisan ialah untuk mengetahui respon pemerintah dalam menumpas gerakan DI/TII melalui TNI Divisi Siliwangi serta strategi dalam pelaksanaan operasi penumpasan gerakan DI/TII di Garut.

4. Pendekatan Politik

Pendekatan politik. Menurut Deliar Noer merupakan usaha, tindakan, atau kegiatan manusia dalam kegiatannya yang berkaitan dengan kekuasaan suatu negara yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi, mengubah, dan mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat. Pendekatan politik ini memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat.⁴⁶ Pendekatan politik dikaji karena berkaitan dengan organisasi, dan kepemimpinan yang dilakukan oleh TNI dalam penumpasan DI/TII di Garut.

⁴⁵Nugroho Notosusanto, *Sedjarah dan Hankam*, (Jakarta: Dephankam, 1968), hlm.30.

⁴⁶Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 18.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul *Peranan Batalyon 306 Divisi Siliwangi Dalam Penumpasan Gerakan DI/TII di Garut 1950-1962* ini terdiri dari lima bab. Peneliti akan memberikan gambaran singkat dari tiap bab yang akan dibahas. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penyusunan kerangka penelitian secara sistematis. Garis besar isi penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama akan berisi tentang segala sesuatu yang mendasari penelitian. Bab ini meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, historiografi yang relevan, metode penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian yang diterapkan, serta yang terakhir ialah sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM GARUT SEBAGAI DAERAH PERISTIWA DI/TII

Bab ini akan menjelaskan tinjauan umum Garut sebagai daerah terjadinya peristiwa berdasarkan kondisi geografis. Bab ini menjelaskan bagaimana asal-usul wilayah Garut berdiri. Selain itu pada bab ini akan dijelaskan bagaimana kehidupan sosial dari aspek budaya dan politik.

BAB III: PEMBERONTAKAN DI/TII DI GARUT

Bab ini menguraikan berdirinya DI/TII di Garut yang terdiri dari tiga aspek. Pada sub bab pertama dijelaskan mengenai berdirinya gerakan DI/TII. Pada sub bab selanjutnya akan dibahas mengenai faktor pergerakan Divisi Siliwangi yang

mempengaruhi gerakan DI/TII, dan bagian sub bab terakhir akan dibahas mengenai perkembangan DI/TII dan aktifitasnya di Garut seperti bergerilya, pembakaran rumah, penjarahan, dan pertempuran melawan pasukan TNI.

BAB IV: OPERASI PENUMPASAN GERAKAN DI/TII GARUT 1950-1962

Bab ini akan menguraikan pelaksanaan operasi militer yang dilakukan oleh pasukan TNI, serta peran dari Batalyon 306. Pada sub bab pertama akan dijelaskan penumpasan DI/TII pada tahun 1950-1958. Pada sub bab selanjutnya akan membahas operasi penumpasan pada tahun 1959-1962. Pada sub bab terakhir akan membahas bagaimana dampak pasca operasi militer terhadap masyarakat.

BAB V: KESIMPULAN

Bab terakhir ini akan memberikan kesimpulan dari penjelasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Dalam bagian kesimpulan, peneliti akan memberikan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan pada bab I.